

Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Nur Laila Yuliani

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Magelang
Jln. Tidar No 21 Magelang Telpn 0293 362082
nurlailay.feummgl78@gmail.com*

ABSTRACT

This research aimed to examine the influence of local financial management information system and implementation of performance-based budgeting toward performance of local government and public accountability. The mainspring of this research is motivated by empirical studies on the performance of local government and public accountability are still diverse and growing importance of local government performance assessment and public accountability as a form of accountability to the central government and the society. The research sample consisted of 104 SKPD employees in Magelang regency. This research provides evidence that the area of local financial management information system has an influence on the performance of local government but has no effect on public accountability, while the implementation of performance-based budgeting has a good effect on the performance of local government and public accountability. Moreover the good performance of local government can increase the value of public accountability.

Keywords: Local Financial Management Information System, Implementation of Performance-Based Budgeting, Performance of Local Government, Public Accountability.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitas publik. Dorongan utama penelitian ini dilatarbelakangi oleh kajian empiris mengenai kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitas publik yang masih beragam serta semakin pentingnya penilaian kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitas publik sebagai bentuk pertanggungjawaban ke pemerintah pusat dan masyarakat. Sampel penelitian

ini terdiri dari 104 pegawai di SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Magelang. Studi ini memberikan bukti bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah tetapi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik, sedangkan penerapan anggaran berbasis kinerja mempunyai pengaruh baik terhadap kinerja pemerintah daerah maupun akuntabilitas publik. Selain itu kinerja pemerintah daerah yang baik dapat meningkatkan nilai akuntabilitas publik. Kata Kunci: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kinerja Pemerintah Daerah, Akuntabilitas Publik.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dari pelimpahan Pemerintah Pusat. Walaupun urusan pemerintahan seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional masih diatur oleh Pemerintah Pusat.

Pendelegasian kewenangan tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka Desentralisasi Fiskal. Kewenangan pendanaan yang diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dengan wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).

Anggaran Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran Daerah menduduki posisi sentral sebagai instrumen kebijakan dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran Daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas berbagai unit kerja (Putra, 2010).

Reformasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah juga dilakukan disamping reformasi anggaran daerah. Hal tersebut dilakukan atas dasar berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004. Reformasi yang dilakukan dengan menggunakan pola penganggaran berbasis kinerja dan laporan pertanggungjawaban yang juga bersifat kinerja.

Melalui sistem penganggaran berbasis kinerja ini penetapan besarnya alokasi anggaran daerah lebih mempertimbangkan nilai uang (*value for money*) dan nilai uang yang mengikuti fungsi (*money follow function*) sesuai dengan kebutuhan riil setiap unit kerja. Hal ini karena APBD merupakan penjabaran kuantitatif dari program kebijakan serta usaha pembangunan yang dituangkan dalam bentuk aktivitas yang dimiliki oleh unit kerja terkecil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan dalam setiap tahun. Dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja maka setiap pemerintah daerah akan diketahui kinerjanya serta dapat tercermin pada laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan prestasi kerja satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).

Penyusunan APBD berbasis kinerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya dituntut lebih responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2006).

Berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah telah mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih lanjut Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 kemudian disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dengan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, perubahan anggaran, pertanggungjawaban serta akuntansi dan pelaporan mengalami perubahan yang fundamental dibanding dengan regulasi yang berlaku sebelumnya. Salah satu perubahan tersebut adalah dilimpahkannya sebagian mekanisme pengelolaan keuangan di Badan, Biro, Bagian Keuangan kepada SKPD. Lingkup penatausahaan keuangan yang dilimpahkan diantaranya pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang meliputi Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) maupun Langsung (LS) serta penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Selain itu terjadi perubahan yang terkait dengan laporan-laporan yang harus dibuat para pengelola keuangan (bendahara, pejabat penatausahaan keuangan SKPD, pejabat pelaksana teknis kegiatan) serta diharuskannya proses akuntansi berupa jurnal dan buku besar dalam menghasilkan laporan keuangan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Hal tersebut menyebabkan tugas para pengelola keuangan jauh lebih banyak dan rumit dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Semakin banyak dan rumitnya tugas

para pengelola keuangan daerah, maka menjadi keharusan akan penggunaan teknologi informasi. Dengan penggunaan teknologi informasi, tugas-tugas para pengelola keuangan daerah akan semakin terbantu dan dapat menghasilkan formulir-formulir maupun laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pimpinan SKPD secara akurat dan tepat waktu. Penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan keuangan daerah telah diakomodir dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 225 yang memperkenankan dipergunakannya aplikasi komputer dalam mengelola keuangan daerah sehingga dapat menghasilkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja merupakan keluaran atau hasil dari suatu kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1). Ukuran kinerja dalam anggaran memberikan dorongan kepada para pelaksana anggaran untuk dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai ukuran kinerja yang ditetapkan. Kegagalan dalam pencapaian kinerja menjadi ukuran untuk melakukan perbaikan pada masa yang akan datang. Sementara keberhasilan atas kinerja membutuhkan suatu penghargaan untuk dapat meningkatkan produktivitas serta untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat atau publik terhadap pelaksanaan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengamanatkan untuk dilakukan penilaian atas prestasi kerja dengan menggunakan tolok ukur, indikator dan target kinerja. Hasil akhir atas penilaian kinerja adalah capaian-capaian kinerja yang diformulasikan dalam bentuk ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis dan efisiensi adalah pelaksanaan suatu kegiatan, sedangkan efektivitas adalah pelaksanaan suatu program. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, pemerintah daerah belum sepenuhnya menggunakan indikator ekonomis, efisiensi dan efektivitas, sehingga pengukuran kinerja di pemerintah daerah belum sepenuhnya baik.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Akuntabilitas (*accountability*) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya (Wahyuni dalam Halim & Damayanti, 2007). Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999). Pemerintah pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Akuntabilitas manajerial merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas manajemen pemerintah daerah. Tidak dipenuhinya prinsip pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas. Jika masyarakat menilai pemerintah daerah tidak *accountable*, masyarakat dapat menuntut pergantian pemerintahan, penggantian pejabat, dan sebagainya. Rendahnya tingkat akuntabilitas juga meningkatkan risiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi.

Manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena dana yang digunakan dalam penyediaan layanan berasal dari masyarakat baik secara langsung (diperoleh dengan mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri), maupun tidak langsung (melalui mekanisme perimbangan keuangan). Pola pertanggungjawaban pemerintah daerah sekarang ini lebih bersifat horisontal di mana pemerintah daerah bertanggung jawab baik kepada DPRD maupun kepada masyarakat luas (*dual horizontal accountability*). Namun demikian, pada kenyataannya sebagian besar pemerintah daerah lebih menitikberatkan pertanggungjawabannya kepada DPRD daripada masyarakat luas (Mardiasmo, 2003).

Penelitian tentang sistem informasi pengelolaan keuangan, anggaran berbasis kinerja, kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah telah banyak dilakukan. Kloot (1999) yang meneliti mengenai pengukuran kinerja dan akuntabilitas di pemerintah Lokal victoria Australia yang menemukan bahwa ukuran kinerja secara finansial hanya dapat mengukur sebagian kecil kinerja pemerintahan sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja secara non finansial. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penggunaan ukuran kinerja berhubungan dengan peningkatan akuntabilitas pemerintahan. Pemberian pelayanan terhadap konsumen dan kualitas merupakan dua area ukuran kinerja non finansial yang sedang dikembangkan saat ini. Sejalan dengan hasil penelitiannya Akbar, dkk (2010) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran kinerja pada pemerintah daerah di Indonesia, menunjukkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan indikator kinerja, yaitu kesulitan metrik (ukuran), pengetahuan teknis, komitmen manajemen, dan kepentingan pihak legislatif. Dari empat faktor tersebut, faktor legeslatif yang sangat berpengaruh sangat kuat, serta mengemukakan faktor yang paling kuat dalam akuntabilitas internal dan eksternal adalah komitmen manajemen.

Penelitian Rohman (2009) tentang pengaruh implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan dan kinerja pemerintah daerah menunjukkan hasil bahwa implementasi sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan dan kinerja pemerintah daerah. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Putra (2010) yang meneliti tentang pengaruh

penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD di pemerintah Kabupaten Simalungun menunjukkan hasil bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Sedangkan penelitian Maroki (2011) tentang pengaruh implementasi *e-government* dan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah provinsi Sulawesi Utara. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa implementasi *e-government* dan penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Propinsi Sulawesi Utara.

Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pengetahuan dengan menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja dan akuntabilitas publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah melaksanakan penganggaran berbasis kinerja sesuai dengan PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Di samping itu Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah membangun dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang berbasis komputer yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah yang sudah diterapkan sejak tahun 2011. Dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah tersebut, setiap pimpinan SKPD dapat memperoleh data dengan cepat berupa berapa besar persentase penyerapan dana masing-masing kegiatan pada masing-masing SKPD dari waktu ke waktu, sehingga diharapkan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang menjadi semakin baik.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitas publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas publik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi jajaran praktisi di pemerintah daerah, sehingga dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah.

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diperlukan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi

pengelolaan keuangan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada pada pemerintahan daerah. Dari sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pimpinan SKPD dapat memonitor sudah sejauhmana suatu program atau kegiatan telah terlaksana, sudah seberapa besar penyerapan dana atas program atau kegiatan yang telah dilakukan sehingga dapat dinilai apakah program atau kegiatan yang dilakukan sudah ekonomis, efisien dan efektif. Hasil akhir dari sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dapat berupa formulir-formulir yang dibutuhkan para pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) antara lain laporan berkala maupun laporan tahunan.

Penelitian *Winfield* (1978), *Chang and Mos* (1985), *Boyne and Law* (1991) telah mengemukakan pentingnya laporan tahunan sebagai alat memperkuat akuntabilitas. *Marston and Shrives* (1991) menyimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan dokumen yang paling komprehensif yang tersedia bagi publik dan sebagai alat pengungkap utama. *Parker* (1982) menekankan pentingnya laporan tahunan sebagai media komunikasi masa meski laporan tahunan bukanlah satu-satunya sumber informasi tentang kinerja organisasi, namun masih dipandang sebagai sumber penting karena luas cakupan dan ketersediaannya.

Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat dengan Visi, Misi dan Rencana Strategis organisasi. Anggaran Berbasis Kinerja mengalokasikan sumber daya pada program bukan pada unit organisasi semata dan memakai pengukuran keluaran sebagai indikator kinerja organisasi (Bastian, 2006).

Penganggaran berbasis kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas atau kegiatan. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara *output* dengan *input*. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila dengan *input* yang sama *output* yang dihasilkan lebih besar, atau dengan *input* yang lebih sedikit *output* yang dihasilkan adalah sama. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan atau rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan terukur serta penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif.

Penyusunan APBD berbasis kinerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya, dituntut lebih responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2006).

Penerapan anggaran berbasis kinerja di Indonesia dimaksudkan untuk menjawab tuntutan demokratisasi yang mengedepankan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam bidang pemerintahan dan politik, khususnya bidang pengelolaan keuangan negara (BIGG, 2005). Lebih lanjut, BIGG (2005) menyatakan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja secara umum didasarkan pada konsep *value for money* (ekonomi, efisiensi, efektivitas) dan prinsip tata pemerintahan yang baik termasuk adanya pertanggungjawaban para pengambil keputusan atas penggunaan uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan indikator yang telah ditetapkan. Secara lengkap prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja meliputi: *value for money*, aturan hukum, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, keadilan, pengikutsertaan, pendelegasian pelayanan, efektivitas dan efisiensi yang berkelanjutan.

Akuntabilitas Publik

Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: 1) Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR; dan 2) akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas publik dalam konteks organisasi pemerintah adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak politik (Mardiasmo, 2002).

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 dan 5, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada *output*, dengan menggunakan konsep nilai uang (*value for money*) serta prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, pasal 1).

Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi pada suatu periode tertentu. Menurut Stoner (1996) kinerja (*performance*) merupakan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok atau organisasi. Pada sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode. Kinerja manajerial merupakan kinerja para individu dalam kegiatan-kegiatan manajerial, seperti perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi dan perwakilan (Mahoney, 1963).

Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1). Dengan demikian, ukuran kinerja dalam anggaran memberikan dorongan kepada para pelaksana anggaran untuk dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai ukuran kinerja yang ditetapkan. Kegagalan dalam pencapaian kinerja menjadi satu ukuran untuk melakukan perbaikan pada masa yang akan datang. Sementara keberhasilan atas kinerja membutuhkan suatu penghargaan untuk dapat meningkatkan produktivitas serta untuk mendapatkan dukungan publik terhadap pemerintah.

Fokus pengukuran kinerja pada awalnya adalah pada pengukuran tingkat efisiensi.

Hal tersebut berhubungan erat dengan obyek pembahasan yang pada awalnya merupakan pengukuran kinerja kegiatan usaha swasta. Ketika kesadaran para pegambil kebijakan muncul bahwa kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya dapat diukur efisiensi dan efektivitasnya, maka pembahasan mengenai pengukuran kinerja pemerintah mulai banyak dilakukan. Walaupun masalah yang muncul dalam pelayanan publik banyak hal-hal yang bersifat kualitatif.

Mengukur kinerja kegiatan suatu organisasi dapat mencerminkan baik tidaknya pengelolaan organisasi yang bersangkutan. Pengelola suatu organisasi perlu mengetahui apakah kegiatan pelayanan yang mereka berikan sudah memenuhi prinsip-prinsip ekonomis, efisien dan efektif. Hal ini merupakan wujud pertanggungjawaban pengelola kepada para *stakeholders*, tidak hanya sebatas pelayanan fisik, melainkan juga terkait pengelolaan usaha yang baik.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa kinerja mencerminkan ekonomis, efisiensi dan efektifnya suatu pelayanan publik. Pengertian ekonomis adalah perbandingan *input* dengan *output value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

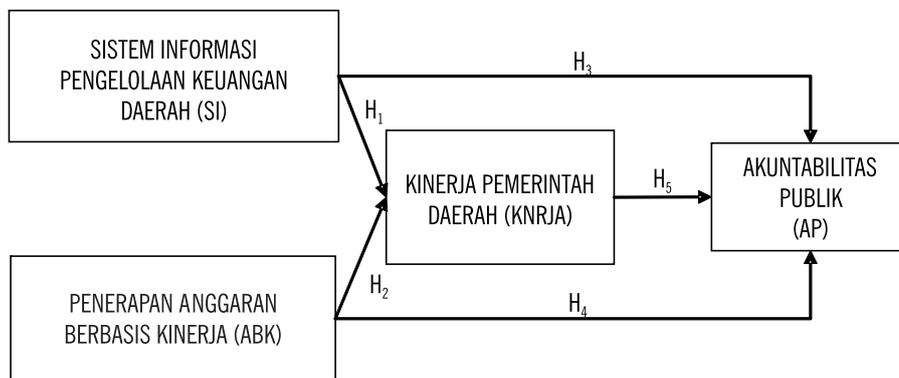
Pengukuran kinerja SKPD dalam konteks organisasi pemerintah daerah dilakukan untuk menilai seberapa baik SKPD tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu. Pengukuran kinerja SKPD merupakan wujud dari *vertical accountability* yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan *horizontal accountability* pemerintah daerah yaitu kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya.

HIPOTESIS

- H₁: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.
- H₂: Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

- H₃: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.
- H₄: Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.
- H₅: Kinerja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.
- H₆: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik melalui Kinerja Pemerintah Daerah

MODEL PENELITIAN



Pengembangan dari penelitiannya Rahman, 2009.

GAMBAR 1. MODEL PENELITIAN

METODE PENELITIAN

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan dengan mengambil subjek penelitian yang terpilih secara benar oleh peneliti menurut persyaratan tertentu. Penelitian ini mengambil sampel para kepala SKPD, PPK SKPD dan Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

Jenis dan Metoda Pengumpulan Data

Metoda penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survei langsung kepada responden. Pendekatan kuantitatif untuk data survei dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner fisik. Survei ditujukan kepada responden yaitu

para kepala SKPD, PPK SKPD dan Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Kuesioner diantarkan langsung ke SKPD-SKPD di Kabupaten Magelang. Kuesioner akan diambil kembali 1 (satu) minggu setelah kuesioner dibagikan. Kuesioner terdiri dari 2 (dua) bagian dan disertai 1 (satu) lampiran, Bagian I berisi pernyataan tentang identitas responden, dan Bagian II berisi pertanyaan tentang instrumen penelitian dengan pengukuran respon skala likert 5.

Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu penerapan sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Putra, 2010). Penerapan anggaran berbasis kinerja adalah penerapan dari suatu sistem anggaran pemerintah daerah yang berorientasi pada upaya pencapaian hasil kerja atau kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan pada unit-unit satuan kerja pemerintah daerah. Penerapan sistem anggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 dan Kep- mendagri No. 29 Tahun 2002. Sedangkan akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) atas keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi pada suatu periode tertentu. Menurut Stoner (1996) kinerja (*performance*) merupakan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok atau organisasi. Pada sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode.

Variabel-variabel penelitian tersebut diukur dengan menggunakan instrumen kuesioner yang berisi beberapa pernyataan. Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner ini merupakan replikasi yang diambil dari beberapa penelitian sebelumnya dengan mengacu pada landasan teoritis yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari masing-masing variabel penelitian tersebut, responden diminta untuk memberikan penilaian atau pendapat dengan skala Likert 1-5. Angka 1 menunjukkan penilaian atau pendapat sangat tidak setuju (STS) sampai dengan angka 5 yang menunjukkan penilaian/pendapat sangat setuju (SS).

Uji Kualitas Instrumen

Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan instrumen penelitian dapat mengukur konstruk. Validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan tugasnya mencapai sarannya. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011).

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). Menurut Hair, *et. al.* (2010), *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) adalah sebuah teknik interdependen yang bertujuan untuk mendefinisikan indikator yang mendasari variabel dalam sebuah analisis. Sedangkan menurut Ghozali (2011), Uji Validitas menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) digunakan untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator suatu variabel yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah konstruk atau variabel yang digunakan. Jika masing-masing indikator merupakan indikator pengukur konstruk atau variabel maka akan memiliki nilai faktor *loading* yang tinggi.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kebebasan instrumen dari kesalahan. Reliabilitas suatu pengukur menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari suatu instrumen untuk mengukur suatu konsep dan berguna untuk mengakses “kebaikan” dari suatu pengukur (Sekaran, 2003). Isaac dan Michael (1981) dalam Jogiyanto (2007) mendefinisikan reliabilitas sebagai konsistensi antar pengukuran secara berurutan. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metoda *Cronbach Alpha*. Menurut Nunnaly (1967) dalam Ghozali (2011), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak untuk masing-masing variabel penelitian baik independen maupun dependen. Uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual (pengganggu) mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011). Untuk melakukan uji normalitas dapat digunakan analisis grafik

(berupa histogram dan *normal probability plot*) dan uji statistik (koefisien *skewness* dan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*). Dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Residual dinyatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* > 0,05 (Ghozali, 2011).

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independennya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model, dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *Tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10. Bila ternyata dalam model terdapat multikolonieritas, maka akan diatasi dengan transformasi variabel. Transformasi variabel merupakan salah satu cara mengurangi hubungan linier diantara variabel independen.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah ada korelasi (pengaruh) dari variabel dalam model melalui tenggang waktu. Konsekuensi dari adanya autokorelasi dalam suatu model regresi adalah varians sampel tidak dapat menggambarkan varians populasinya. Lebih jauh lagi, model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai variabel independen tertentu (Ghozali, 2011). Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji *Durbin-Watson*. Salah satu cara untuk menghilangkan pengaruh autokorelasi tersebut adalah dengan memasukkan *lag* variabel dependennya ke dalam model regresi.

Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Linier Berganda

$$\text{KNRJA} = b_1 \text{SI} + b_2 \text{ABK} + e_1$$

$$\text{AP} = b_1 \text{SI} + b_2 \text{ABK} + b_3 \text{KNRJA} + e_2$$

Keterangan:

KNRJA = Kinerja Pemerintah Daerah

AP = Akuntabilitas Publik

SI = Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

ABK = Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi dari SI, ABK, KNRJA
 e = eror

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Uji R² menunjukkan potensi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya koefisien dari 0 sampai 1, besarnya koefisien determinasi semakin mendekati 0 berarti semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sebaliknya besarnya koefisien determinasi semakin mendekati 1, maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).

Uji F

Uji F (*Goodness of fit test*) dipakai untuk melihat baik tidaknya model yang digunakan dalam penelitian. Kriteria yang digunakan dalam uji F ini adalah sebagai berikut: jika nilai signifikansi (*p-value*) < 0,05 maka model yang digunakan sudah baik.

Uji t

Uji t dipakai untuk melihat pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Kriteria yang digunakan dalam uji t ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika variabel independen mempunyai nilai *t-statistic* > *t-table* dan nilai signifikansi (*p-value*) < 0,05 maka variabel independen (yang sedang diuji) berpengaruh secara individu terhadap variabel dependen.
- b. Jika variabel independen mempunyai nilai *t-statistic* < *t-table* dan signifikansi e" 0,05 maka variabel independen (yang sedang diuji) secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang mengurus bidang keuangan, yaitu Kepala SKPD, Kabag Keuangan, dan Bendahara. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD yang merupakan dinas, badan, kantor yang berada di Kabupaten Magelang.

Pilot Study

Pilot study sangat penting untuk dilakukan karena bisa mendeteksi kelemahan dalam instrumen dan desain penelitian (Cooper dan Schindler, 2006). Instrumen penelitian akan menjadi berkualitas apabila terbukti validitas dan reliabilitasnya, maka sebelum

melakukan mengumpulkan data yang sesungguhnya di lapangan, dilakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Validitas merupakan tingkat di mana sebuah pengujian mengukur apa yang benar-benar atau seharusnya diukur (Cooper dan Schindler, 2006; Hartono, 2010), sedangkan reliabilitas menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari suatu instrumen yang mengukur suatu konsep dan berguna untuk mengakses “kebaikan” dari suatu pengukur (Sekaran, 2010). Dalam rangka pengujian validitas dan reliabilitas, kuesioner terlebih dahulu diujicobakan (*pilot study*) kepada 51 responden. Responden ini adalah para pegawai pemerintah daerah yang sedang menempuh kuliah di Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (MEP UGM) dan pegawai pemerintah daerah yang bukan menjadi sampel. Instrumen yang telah diujicobakan kemudian dianalisis dengan menggunakan *software SPSS*.

TABEL I. CROSS LOADING (PILOT STUDY)

	SI	ABK	KNRJA	AP
SI1	0,636	0,433	0,004	0,188
SI2	0,583	0,310	0,079	0,051
SI3	0,857	0,014	0,080	0,010
SI4	0,901	0,151	0,071	0,030
SI5	0,882	0,021	0,132	0,131
SI6	0,814	0,086	0,167	0,035
ABK1	0,484	0,570	0,232	0,025
ABK2	0,263	0,637	0,335	0,193
ABK3	0,137	0,679	0,286	0,210
ABK4	0,267	0,690	0,031	0,178
ABK5	0,222	0,682	0,056	0,086
ABK6	0,131	0,551	0,018	0,171
ABK7*	0,241	0,453	0,211	0,345
ABK8	0,091	0,615	0,096	0,031
ABK9*	0,144	0,448	0,103	0,245
ABK10*	0,137	0,460	0,167	0,315
ABK11*	0,266	0,454	0,222	0,314
KNRJA1	0,216	0,105	0,692	0,211
KNRJA2	0,365	0,320	0,555	0,153
KNRJA3	0,276	0,113	0,705	0,162
KNRJA4	0,312	0,111	0,659	0,122
KNRJA5	0,199	0,268	0,618	0,067
KNRJA6	0,148	0,153	0,556	0,084
KNRJA7	0,228	0,390	0,586	0,228
AP1	0,108	0,003	0,236	0,540
AP2	0,287	0,105	0,314	0,530
AP3	0,002	0,009	0,163	0,801
AP4	0,045	0,139	0,287	0,821
AP5*	0,407	0,006	0,147	0,471
AP6	0,070	0,433	0,128	0,686
AP7	0,384	0,403	0,209	0,658
AP8	0,377	0,410	0,076	0,640

Hasil *pilot study* menunjukkan bahwa nilai faktor *loading* lebih besar dari 0,5 ($> 0,5$) yang berarti tingkat validitas signifikan secara praktis. Kecuali pada variabel ABK (Anggaran Berbasis Kinerja) pada instrumen 7, 9, 10, dan 11 serta variabel AP (Akuntabilitas Publik) pada instrumen 5 yang memiliki nilai faktor *loading* kurang dari 0,5 ($< 0,5$), sehingga instrumen ABK 7, 9, 10, 11 dan AP 5 tidak dapat digunakan lebih lanjut.

TABEL 2. UJI RELIABILITAS (PILOT STUDY)

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Sistem Informasi	0.844	Reliabel
Anggaran Berbasis Kinerja	0.746	Reliabel
Kinerja Pemerintah Daerah	0.743	Reliabel
Akuntabilitas Publik	0.765	Reliabel

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa variabel Sistem Informasi, Anggaran Berbasis Kinerja, Kinerja Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Publik memiliki nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua instrumen variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan memasukkan kuesioner penelitian pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Rincian sampel penelitian dan tingkat pengembalian dapat dilihat pada tabel 3.

TABEL 3. SAMPEL PENELITIAN DAN TINGKAT PENGEMBALIAN

URAIAN	JUMLAH
Kuesioner yang dikirim	111
Kuesioner yang kembali	107
Kuesioner yang tidak lengkap	(3)
Jumlah kuesioner yang diolah	104
Tingkat pengembalian kuesioner	96,4%
Tingkat pengembalian kuesioner yang dapat diolah	93,69%

Tabel 4 menunjukkan profil responden yang meliputi jenis kelamin, usia, lama bekerja, tingkat pendidikan dan frekuensi diklat.

TABEL 4. PROFIL RESPONDEN

Keterangan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	48	46,15%
Perempuan	56	53,85%
	104	100,00%
Usia		
20 - 30 tahun	10	9,62%
31 - 40 tahun	21	20,19%
> 40 tahun	73	70,19%
	104	100,00%
Pendidikan		
D3	9	8,65%
S1	73	70,19%
S2	22	21,15%
	104	100,00%
Lama Bekerja		
0 - 5 tahun	22	21,15%
6 - 10 tahun	29	27,88%
16 - 20 tahun	21	20,19%
>20 tahun	32	30,77%
	104	100,00%
Diklat		
Tidak pernah	24	23%
1 - 2 kali	34	33%
3 - 5 kali	35	34%
6 - 10 kali	11	11%
	104	100%

Analisis Data

Uji Validitas

Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 5.

Parameter yang digunakan untuk uji validitas yaitu dengan melihat nilai faktor *loading*. Hasil validitas yang terlihat pada tabel 5 menunjukkan bahwa masing-masing indikator pada suatu konstruk di dalam model pengukuran telah memenuhi syarat. Hal tersebut dapat dilihat dari masing-masing indikator di suatu konstruk berbeda dengan indikator di konstruk lain dan mengumpul pada konstruk tersebut dengan nilai faktor *loading* > 0,5, sehingga indikator yang digunakan dalam penelitian ini semuanya valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2011). Hasil pengujian reliabilitas yang terlihat pada tabel 6 menunjukkan bahwa variabel Sistem Informasi, Anggaran Berbasis Kinerja, Kinerja Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Publik memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,70. Jadi dapat disimpulkan bahwa

TABEL 5. CROSS LOADING

	SI	ABK	KNRJA	AP
SI1	0,661	0,435	0,070	0,088
SI2	0,633	0,490	0,001	0,128
SI3	0,718	0,471	0,136	0,165
SI4	0,694	0,474	0,062	0,185
SI5	0,621	0,444	0,079	0,049
SI6	0,624	0,517	0,148	0,063
ABK1	0,212	0,586	0,351	0,060
ABK2	0,464	0,511	0,298	0,072
ABK3	0,467	0,662	0,173	0,064
BK4	0,093	0,674	0,345	0,062
ABK5	0,413	0,503	0,115	0,230
ABK6	0,127	0,575	0,226	0,302
ABK8	0,194	0,623	0,242	0,260
KNRJA1	0,040	0,004	0,702	0,224
KNRJA2	0,187	0,019	0,584	0,108
KNRJA3	0,052	0,063	0,737	0,313
KNRJA4	0,068	0,140	0,732	0,153
KNRJA5	0,370	0,084	0,622	0,337
KNRJA6	0,439	0,385	0,658	0,052
KNRJA7	0,440	0,275	0,584	0,004
AP1	0,090	0,042	0,363	0,696
AP2	0,095	0,129	0,304	0,726
AP3	0,214	0,186	0,018	0,646
AP4	0,130	0,191	0,214	0,585
AP6	0,008	0,307	0,289	0,688
AP7	0,033	0,060	0,226	0,702
AP8	0,084	0,188	0,230	0,656

TABEL 6. PENGUJIAN RELIABILITAS

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Sistem Informasi (SI)	0.898	Reliabel
Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	0.794	Reliabel
Kinerja Pemerintah Daerah (KNRJA)	0.807	Reliabel
Akuntabilitas Publik (AP)	0.872	Reliabel

semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel. Secara umum, dapat dinyatakan bahwa instrumen penelitian adalah valid serta dapat diandalkan (reliabel), sehingga layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas data yang digunakan adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*, data dinyatakan

terdistribusi normal jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* $> 0,05$ (Ghozali, 2011). Hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 1.156 dan nilai signifikan pada 0.138 hal ini berarti data terdistribusi normal karena *Asymp Sign* $>$ Alpha 5%, yaitu $0.138 > 0.05$.

Uji Multikolonieritas

Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel 7.

TABEL 7. HASIL UJI MULTIKOLONIERITAS

Variabel Bebas	Collinerity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
SI	0,845	1,184	Non multikolonieritas
ABK	0,497	2,014	Non multikolonieritas
KINERJA	0,463	2,159	Non multikolonieritas

Suatu model regresi dinyatakan non multikolonieritas adalah jika mempunyai nilai *tolerance* diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10. Hasil pengujian multikolonieritas yang terlihat pada tabel 7 menunjukkan bahwa variabel SI, ABK dan Kinerja memiliki nilai *tolerance* diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10 yang berarti variabel-variabel tersebut tidak mengalami multikolonieritas.

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi yang digunakan adalah uji *Durbin Watson*. Data dikatakan tidak mengalami autokorelasi baik positif maupun negatif jika nilai *Durbin Watson* (DW) diantara du dan $4 - du$ ($du < dw < 4 - du$). Hasil pengujian *Durbin Watson* menunjukkan bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 1,866 yang terletak diantara $DU < DW < 4-DU$ atau $1,613 < 1,866 < 4-1,613$. Berarti bahwa model regresi linier berganda yang digunakan tidak terdapat gejala autokorelasi.

Hasil Analisis

Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 8.

TABEL 8. UJI R^2

	R	R Square	Adjusted R Square
Regresi I	0,733	0,537	0,528
Regresi II	0,791	0,626	0,615

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi I yang dilakukan seperti terlihat pada tabel 8, menunjukkan nilai *adjusted R*² 0.528. Nilai tersebut memiliki arti bahwa variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Berbasis Kinerja mempunyai pengaruh sebesar 52,8% terhadap variabel Kinerja. Sedangkan sisanya sebesar 38,85% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian. Sedangkan untuk analisis regresi II, diperoleh nilai *adjusted R*² 0.615. Nilai tersebut memiliki arti bahwa variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan, Anggaran Berbasis Kinerja dan Kinerja mempunyai pengaruh sebesar 61,5% terhadap variabel Akuntabilitas Publik. Sedangkan sisanya sebesar 38,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

Uji F (*Goodness of Fit Test*)

Uji F digunakan untuk melihat baik tidaknya model yang digunakan dalam penelitian. Model yang digunakan sudah baik jika nilai signifikansi (*p-value*) < 0,05. Berdasarkan pada hasil pengujian analisis regresi I dan II yang dilakukan dapat diketahui bahwa *P-value* < 0,05. Artinya, model penelitian yang dipakai sudah baik.

Uji Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 9 dan tabel 10

TABEL 9. ANALISIS REGRESI I

Variabel	Koefisien	t	Sig.
Sistem Informasi (SI)	0,195	2,738	0,007
Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	0,650	9,140	0,000

TABEL 10. ANALISIS REGRESI II

Variabel	Koefisien	t	Sig.
Sistem Informasi (SI)	0,098	1,477	0,143
Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	0,195	2,252	0,027
Kinerja Pemerintah Daerah (KNRJA)	0,596	6,630	0,000

Hipotesis 1: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai *t-statistic* sebesar 2,738 > *t-table* 1,660 dan *p-value* sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai koefisien 0,195 yang memenuhi syarat, sehingga sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, H1 pada penelitian ini terdukung secara empirik (dapat diterima).

Hipotesis 2: Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai *t-statistic* sebesar $9,140 > t\text{-table } 1,660$ dan *p-value* sebesar $0,007 < 0,05$ dengan nilai koefisien $0,650$ yang memenuhi syarat, sehingga penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, H2 pada penelitian ini terdukung secara empirik (dapat diterima).

Hipotesis 3: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai *t-statistic* sebesar $1,477 < t\text{-table } 1,660$ dan *p-value* sebesar $0,143 > 0,05$ dengan nilai koefisien $0,098$ yang tidak memenuhi syarat, sehingga sistem informasi pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Dengan demikian, H3 pada penelitian ini tidak terdukung secara empirik (tidak diterima).

Hipotesis 4: Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai *t-statistic* sebesar $2,252 > t\text{-table } 1,660$ dan *p-value* sebesar $0,027 < 0,05$ dengan nilai koefisien $0,195$ yang memenuhi syarat, sehingga penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Dengan demikian, H4 pada penelitian ini terdukung secara empirik (diterima).

Hipotesis 5: Kinerja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai *t-statistic* sebesar $6,630 > t\text{-table } 1,660$ dan *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien $0,596$ yang memenuhi syarat, sehingga kinerja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Dengan demikian, H5 pada penelitian ini terdukung secara empirik (diterima).

Hipotesis 6: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik melalui Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengujian regresi linier berganda yang dapat dilihat pada tabel 4.10, menunjukkan hasil bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap akuntabilitas publik, sehingga sistem informasi

pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik melalui kinerja pemerintah daerah. Sedangkan penerapan anggaran berbasis kinerja mempunyai pengaruh langsung terhadap akuntabilitas publik, sehingga penerapan anggaran berbasis kinerja dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas publik melalui kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, H6 dalam penelitian ini tidak terdukung secara empirik (tidak diterima).

Pembahasan

Hipotesis 1: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini menemukan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, yang artinya hipotesis satu (H_1) penelitian ini terdukung. Berarti semakin baik sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diperlukan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada pada pemerintahan daerah.

Penerapan SIPKD akan berpengaruh pada sikap dan perilaku para pegawai dalam lingkungan tersebut. Peraturan pemerintah menuntut semua aparat pemerintah untuk mampu mengimplementasikan SIPKD pada masing-masing wilayahnya. Secara positif keberadaan sistem informasi akan menjadi rangsangan (stimulus) dan tantangan bagi individu dalam organisasi untuk bekerja secara lebih baik, yang pada gilirannya berdampak pada kinerja organisasi. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitiannya Putra (2010) dan Rahman (2009), yang menunjukkan hasil bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD dan implementasi sistem akuntansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hipotesis 2: Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, yang berarti hipotesis dua (H_2) penelitian ini terdukung. Artinya semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.

Penerapan anggaran berbasis kinerja mengharuskan pemerintah untuk mempunyai program prioritas yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan operasional yang memiliki tolok ukur pencapaian hasil yang jelas. Di samping itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk mengalokasikan anggaran yang senantiasa dapat diukur pemanfaatannya agar hemat, berdaya guna dan tepat guna. Dengan demikian diharapkan kinerja pemerintah

daerah dapat meningkat serta pemerintah dapat mempertanggungjawabkan hasil pencapaiannya. Hasil penelitian sesuai dengan penelitiannya Putra (2010), yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara penerapan anggaran berbasis kinerja dengan kinerja SKPD.

Hipotesis 3: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah tidak mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Dengan demikian hipotesis tiga (H_3) pada penelitian ini tidak terdukung, artinya bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap akuntabilitas publik. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya sistem yang digunakan belum *perfect* atau belum bagus, sehingga tidak memudahkan karyawan, dan sumber daya manusia atau karyawan yang kurang memahami sistem tersebut. Padahal sekarang pemerintah daerah dituntut untuk menyampaikan informasi keuangan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui, dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan keleluasaan dan kewenangan dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing.

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan adanya transparansi dan akuntabilitas, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah tersebut. Implementasi dari Sistem informasi keuangan daerah diharapkan dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dari lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2002). Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Maroki (2011) yang menunjukkan hasil bahwa implementasi *egovernment* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Propinsi Sulawesi Utara. Serta berbeda pula dengan hasil penelitiannya Widyaningsih, dkk. (2011) menunjukkan bahwa efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas akuntabilitas keuangan.

Hipotesis 4: Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik, yang berarti hipotesis empat (H_4) penelitian ini terdukung. Artinya semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja, maka semakin baik pula akuntabilitas publiknya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitiannya Antoro (2006) dan Maroki (2011), yang menunjukkan hasil bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

Menurut Hatry (1999), penganggaran berbasis hasil atau kinerja akan memungkinkan pengambil keputusan untuk menyediakan dasar bagi akuntabilitas agensi (pemerintah daerah) yang lebih besar dengan menjelaskan bahwa target kinerja yang *reasonable* disusun untuk suatu tahun anggaran tertentu dan kemudian nilai capaiannya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Beberapa manfaat yang diperoleh dari penerapan penganggaran berbasis kinerja meliputi: 1) Memudahkan pengambil keputusan dalam menentukan prioritas tujuan, sasaran, dan program, kegiatan, dan belanja; 2) Memudahkan dalam mengkomunikasikan prioritas pemerintah kepada masyarakat; dan 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Secara umum prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja didasarkan pada konsep *value for money* (ekonomi, efisiensi, efektivitas) dan prinsip tata pemerintahan yang baik termasuk adanya pertanggungjawaban para pengambil keputusan atas penggunaan uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan indikator yang telah ditetapkan.

Hipotesis 5: Kinerja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Dengan demikian hipotesis lima (H_5) pada penelitian ini terdukung, yang berarti bahwa semakin baik kinerja pemerintah daerah, maka semakin baik pula akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja SKPD merupakan wujud dari *vertical accountability* yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan *horizontal accountability* pemerintah daerah yaitu kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Kloot (1999) yang menunjukkan dan mengindikasikan bahwa penggunaan ukuran kinerja berhubungan dengan peningkatan akuntabilitas pemerintahan. Pemberian pelayanan terhadap konsumen dan kualitas merupakan dua area ukuran kinerja non finansial yang sedang dikembangkan saat ini.

Pengukuran kinerja memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang didalamnya terdapat indikator kinerja dan target kinerja, pelaporan kinerja, dan mekanisme *reward and punishment* (Ormond and Loffler, 2002). Indikator pengukuran kinerja yang baik mempunyai karakteristik *relevant, unambiguous, cost-effective, dan simple* (Accounts Commission for Scotland, 1998) serta berfungsi sebagai sinyal atau alarm yang menunjukkan bahwa terdapat masalah yang memerlukan tindakan manajemen dan investigasi lebih lanjut (Jackson, 1995).

Hipotesis 6: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan

Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik melalui Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja dapat berpengaruh langsung pada akuntabilitas publik, sehingga penerapan anggaran berbasis kinerja dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas publik melalui kinerja pemerintah daerah. Tetapi untuk sistem informasi pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas publik, sehingga sistem informasi pengelolaan keuangan daerah tidak dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas publik melalui kinerja pemerintah daerah, sehingga hipotesis enam (H_6) tidak terdukung.

Semakin baik sistem informasi pengelolaan keuangan daerah akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah tetapi belum bisa menjamin bahwa akuntabilitas publik pemerintah daerah tersebut baik. Tetapi dengan penerapan anggaran berbasis kinerja dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah sehingga akuntabilitas publiknya juga semakin baik.

Menurut Schiavo-Campo and Tomasi (1999), konsep akuntabilitas mencakup proses untuk menunjukkan apakah dana publik telah digunakan secara efisien dan efektif. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Di samping itu apabila pengelolaan keuangan daerahnya baik, maka kinerja pemerintah daerah pun semakin baik, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangannya baik juga.

Pengukuran kinerja SKPD dalam konteks organisasi pemerintah daerah, dilakukan untuk menilai seberapa baik SKPD tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu. Pengukuran kinerja SKPD merupakan wujud dari *vertical accountability* yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan *horizontal accountability* pemerintah daerah yaitu kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya.

Pengukuran kinerja memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang didalamnya terdapat indikator kinerja dan target kinerja, pelaporan kinerja, dan mekanisme *reward and punishment* (Ormond and Loffler, 2002). Indikator pengukuran kinerja yang baik mempunyai karakteristik *relevant, unambiguous, cost-effective, dan simple* (Accounts Commission for Scotland, 1998) serta berfungsi sebagai sinyal atau alarm yang menunjukkan bahwa terdapat masalah yang memerlukan tindakan manajemen dan investigasi lebih lanjut (Jackson, 1995).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah dan akuntabilitas publik di Pemerintah Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: faktor atau variabel yang berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah adalah variabel sistem informasi pengelolaan keuangan dan penerapan anggaran berbasis kinerja.

Selain itu variabel yang berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap akuntabilitas publik adalah variabel penerapan anggaran berbasis kinerja dan variabel kinerja pemerintah daerah, sedangkan variabel sistem informasi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Disamping itu hasil analisis menunjukkan bahwa variabel sistem informasi pengelolaan keuangan dan penerapan anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik melalui kinerja pemerintah daerah.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, sehingga kurang mampu mengeneralisasi.
2. Penelitian ini terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam penerapan peraturan yang ada, sehingga cenderung pasti menerapkan walaupun ada pemerintah yang sudah menerapkan lama atau baru saja menerapkan.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi SKPD di lingkungan pemerintah daerah, khususnya mengenai sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan penerapan anggaran berbasis kinerja serta pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitas publik. Diharapkan dengan adanya sistem informasi dalam pengelolaan keuangan akan memberikan dampak positif terhadap kinerja sehingga akuntabilitas pemerintah juga meningkat. Selain itu dengan penerapan anggaran berbasis kinerja, juga diharapkan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitas publiknya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan dan penerapan anggaran berbasis kinerja itu penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja. Dengan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik maka akuntabilitas publiknya juga baik, sehingga profesionalisme pemerintah daerah juga

meningkat. Beberapa saran yang direkomendasikan untuk penelitian berikutnya, yaitu:

1. Peneliti berikutnya dapat mencari variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi penggunaan kinerja dan akuntabilitas publik seperti *e-government*, pengendalian internal, manajemen berbasis kinerja.
2. Memperluas wilayah penelitian agar dapat menggeneralisasi.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan responden pimpinan SKPD, agar diharapkan dapat mendapatkan pandangan yang berbeda.
4. Penggunaan *mixed method* sangat disarankan bagi penelitian berikutnya, karena dengan menggunakan teknik ini, maka hasil yang diperoleh dapat digali lebih dalam dan dapat melihat dari sudut pandang yang beragam dan kaya dibandingkan apabila hanya menggunakan satu analisis saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Andri Permana Diputra, (2012), Pengaruh Manajemen Berbasis Kinerja dan Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Sleman), Jurnal Program Magister Akuntansi. Vol. 2 No. 1.
- Akbar, Rusdi, Robyn Pilcher dan Brian Perrin, (2010), Performance Measurement in Indonesia: The Case of Local Government, www.afaanz.org/openconf.
- Antoro, Setyawan Dwi, (2006), Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Kota/Kab Di Propinsi DIY. Tesis Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.
- Asmoko, Hindri, (2006), Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol 2. No. 2.
- Baridwan, Zaki, (2003), Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Publik, Makalah Seminar Nasional Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Fakultas Ekonomi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
- Bastian, Indra, (2006), Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi: 2, Salemba Empat, Jakarta.
- BPKP, (2007), Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Pusdiklatwas BPKP, Edisi Kelima.
- Cooper, Donald R. and Schindler, Pamela S, (2006), Business Research Methods, 9th Edition. McGraw-Hill.
- Creswell, John W, (2010), Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Edisi Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Departemen Dalam Negeri, (2002), Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Jakarta.
- Flynn, Morman, (1997), Public Sector Management, Prentice Hall.
- Ghozali, Imam, (2011), Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS, Cetakan V, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, Joseph F, Black, William C, Babin, Barry J. and Anderson, Rolph E, (2010), Multivariate Data Analysis: A Global Perspective, Seventh Edition, Pearson.
- Hartono, Jogiyanto, (2010), Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman (edisi pertama), BPFE Yogyakarta.
- Hatry, Harry, (1999), Performance Measurement, The Urban Institute, Washington D.C.

- Kustiani, Nur Aisyah, (2007), Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa, Tesis Program Magister Sains Akuntansi UGM Yogyakarta.
- Laudon, Kenneth C., and Jane P. Laudon, (2000), *Organization and Technology in The Networked Enterprise, Management Information System, Six Edition, International Edition*, www.prenhall.com/laudon.
- Mardiasmo, (2002), Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI Yogyakarta.
- _____, (2003), Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Makalah Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-8 MEP UGM Yogyakarta.
- _____, (2006), Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2. No.1.
- Moroki, Florence Olivia, (2010), Pengaruh Implementasi E-Government dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tesis Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.
- Mutsqa, Urwatul, (2011), Dampak Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Perbandingan Sumatera dan Jawa. Tesis. Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.
- Parhusip, Poltak Teodorus, (2007), Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Pemerintah Kota atau Kabupaten yang Terjadi Pemekaran, Tesis Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.
- Parker, Wayne C., (1993), *Performance Measurement in the Public Sector*. State of Utah.
- Patton, James M, (1992), *Accountability and Governmental Financial Reporting*, *Financial Accountability and Management*.
- Putra, Tubagus Syah, (2010), Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Di Pemerintah Kabupaten Simalungun, Tesis, Sekolah Pasca Sarjana USU.
- Rohman, Abdul, (2009), Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol.9 No. 1.
- Rohman, Abdul, (2009), Akuntansi Sektor Publik, Telaah dari Dimensi: Pengelolaan Keuangan Daerah, Good Governance, Pengendalian, Pengawasan, dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. BP-Universitas Diponegoro.
- Schiavo-Campo, S., and Tomasi, D., (1999), *Managing Government Expenditure*, Asia Development Bank, Manila.
- Scott, W. R, (2003), *Financial Accounting Theory*, New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.
- Scott, Richard W., (1987), The Adolescence of Institutional Theory, *Administrative Science Quarterly* 32 (4): 493-511.
- Sekaran, Uma and Bougie, Roger, (2010), *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. 5th Edition. John Wiley & Sons Ltd.
- Smith, Peter, (1996), *Measuring Outcome in Public Sector*, Taylor & Francis Publisher, London.
- Tuasikal, Askam, (2007), Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol.08, No.01.
- Widyaningsih, Aristianti. Alvia Triantoro dan Lili Sugeng Wiyantoro, (2011), Hubungan Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan: Kualitas Informasi Laporan Keuangan sebagai Variabel Intervening. Simposium Nasional Akuntansi XIV, Aceh.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- , Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- , (2006), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- , (2007), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- , (2005), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.